



## PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Privat, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D III Bahasa Inggris, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon memeriksa, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **XXX**

Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 10 Juli 2003

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun, 2 bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : XXX

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 13 April 1995

Umur : 26 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : D-III Elektronika Industri

Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Indokomas Buana Perkasa

Tempat kediaman di : XXXKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langungkan karena anak Para Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa berdasarkan surat dari UPTD Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru calon pengantin wanita dinyatakan sehat;

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Pemohon I** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **XXX**;
6. Bahwa **XXX** berstatus perawan dan **XXX** berstatus jelek dan sebagai calon suami **XXX** telah bekerja di PT. Indokomas Buana Perkasa dan memiliki penghasilan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 1006/Kua.16.03.04/PW.01/8/2021, tanggal, 24 Agustus 2021;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 13



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **(XXX)** dengan calon suami bernama **(XXX)**;

3. Membebankan kepada para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar para Pemohon dapat bersabar menunggu umur anak kandung para Pemohon mencapai batas umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama **XXX** dengan calon suaminya bernama **XXX**. Kemudian setelah pemberian nasehat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lakukan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 09 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan Nomor perkara 407/Pdt.P/2021/PA.Bpp, yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Surat Nomor 1006/Kua.16.03.04/PW.01/8/2021 tanggal 24 Agustus 2021, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama **XXX**, yang di keluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Balikpapan tanggal 04 Juni 2021, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 13



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** Nomor 474.1/7895-DKCS/2003 tanggal 3 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kesehatan Calon Penganten atas nama **XXX** dan **XXX** yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru tanggal 28 Agustus 2021 dengan Nomor. 445.5/21-CP/PKM-SPGR, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471052507080007 tanggal 07 November 2018, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan permohonannya para Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan anak kandungnya yang bernama **XXX**, umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon dan umur saya baru mencapai 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar saya telah berkenalan /berpacaran dengan calon suami bernama **XXX**;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah, walaupun saya belum cukup umur, karena saya dan calon suami telah sepakat untuk menikah dan jika di tunda di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan.
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak/ tidak bisa di tunda lagi, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

---

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 13



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah tersebut, keluarga saya dan keluarga calon suami sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **XXX**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan D-III Elektronika Industri, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Indokomas Buana Perkasa, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak kandung para Pemohon, umur saya sudah 26 tahun;
- Bahwa benar saya telah berkenalan /berpacaran dengan anak kandung para Pemohon bernama **XXX** dan calon isteri saya tersebut telah setuju untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah siap untuk menikah walaupun calon isteri belum cukup umur, dan saya bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah tersebut dan yang akan menjadi wali rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung calon isteri saya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan pula orangtua calon suami anak kandung para **XXX**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak kandung para Pemohon adalah anak saya dan para Pemohon tersebut adalah calon besan saya;

---

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 13





- Bahwa para Pemohon dan saya telah sepakat untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan anak saya, namun anak kandung para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tetapi belum bisa diproses karena anak kandung para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan anak saya dengan anak kandung para Pemohon tidak mungkin ditunda lagi, karena anak saya dan anak kandung para Pemohon sudah lama berkenalan /berpacaran hingga sekarang dan sudah mempunyai hubungan yang erat, dan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak saya dengan anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan anak saya dengan anak kandung para Pemohon sudah disetujui oleh semua keluarga dan yang menjadi wali rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX** dengan alasan adanya

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 13



pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P-1) terhadap rencana pernikahan tersebut yang di sebabkan calon mempelai laki-laki sampai sekarang ini masih berumur sekitar 18 tahun 2 bulan dan belum diizinkan untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang isinya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan tersebut telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** dengan alasan karena pihak calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian telah terbukti bahwa **XXX** belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi ijazah SMK) atas nama **XXX**, yang merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi pendidikan seseorang. Maka dengan demikian telah terbukti anak kandung para Pemohon yang bernama **XXX**, berpendidikan SLTA sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX**, yang merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi nama dan kelahiran seseorang. Maka dengan demikian telah terbukti anak kandung para Pemohon yang bernama **XXX**, lahir pada tanggal 10 Juli 2003 atau telah berusia kurang lebih 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) dari UPTD Puskesmas Sepinggian Baru, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang merupakan akta autentik, telah menerangkan bahwa **XXX** dan **XXX** telah diperiksa kesehatannya secara fisik dan telah dinyatakan sehat dengan baik.





Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang merupakan akta autentik, telah menerangkan bahwa **XXX** adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga diantaranya **XXX** yang merupakan anak dari **XXX**, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut dan keterangan para Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai dan keterangan orangtua calon isteri anak kandung Pemohon tersebut, telah terungkap fakta-faktanya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai wanita (**XXX**) saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan (vide bukti P-3), sehingga usia calon mempelai wanita tersebut belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk menikah dan rencana pernikahan ini atas kehendak kedua calon mempelai dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga masing-masing dan yang menjadi wali nikah rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai ini tidak mungkin ditunda lagi, karena kedua calon mempelai sudah lama berkenalan /menjalin hubungan, oleh karena itu di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan kedua calon mempelai tersebut menyatakan sudah siap menjadi ibu dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan sesusuan dan keluarga, baik nasab maupun semenda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tersebut sudah sepakat / menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak kandung para Pemohon bernama **XXX**



tersebut dapat diberikan dispensasi untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **XXX** , meskipun usia anak kandung para Pemohon tersebut belum memenuhi batas usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri, yaitu untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu /minimal tentang perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, hal ini bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui prilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan prilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan di temukan fakta bahwa meskipun anak kandung para Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan, namun fakta tentang tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya, meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya “kematangan jiwa raga” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, Hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin

---

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 13



yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 memberikan ruang kepada Pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran para Pemohon dan keluarga kedua calon suami isteri akan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan bilamana anak kandung para Pemohon dan calon isterinya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran para Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-isteri kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan /berpacaran, dan calon mempelai wanita pada saat ini ternyata sudah hamil dan kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan Ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudloratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf)

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 13



halaman 347 yang artinya ;“Menolak kemafsadatan (kemudloratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama **XXX** , telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan anak kandung para Pemohon (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah di uraikan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut oleh Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah, oleh *Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.* sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nasma Azis, S.Ag.**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 270.000,00**

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)